



Dikatakan, hingga kini Kota Yogyakarta sudah memiliki sebanyak 136 kampung ramah anak. Kampung ramah anak tersebut berbasis rukun warga (RW) dan jumlahnya diharapkan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ia menegaskan tahun ini sudah ada 20 KRA bentukan baru.

#### Evaluasi rutin

Inisiasi pembentukan kampung ramah anak dilakukan Pemkot Yogyakarta pada 2011, yaitu di Kampung Badran Kecamatan Jetis serta di Kampung Sudagaran Kecamatan Umbulharjo. Pembentukan kampung ramah anak berlanjut pada 2012 di 12 kampung dan pada 2013 di 32 kampung.

Perkembangan setiap kampung ramah anak dievaluasi secara rutin. Pada tahun lalu, lanjut Lucy, evaluasi dilakukan dengan meminta setiap kampung ramah anak memaparkan program yang telah dilakukan termasuk kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kampung ramah anak dapat dibagi dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkatan Pertama, Madya, dan Nindya. Adapun kampung yang benar-benar layak disebut sebagai kampung ramah anak. Kini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki 61 indikator kampung ramah anak yang terbagi dalam berbagai aspek.

Antara lain komitmen wilayah, hak sipil dan

kebebasan untuk anak, lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, hak perlindungan khusus, budaya, serta sarana dan prasarana. Nantinya, kata dia, di setiap kampung ramah anak akan dibentuk forum anak kampung yang kemudian menjadi anggota Forum Anak Kota Yogyakarta (Fakta).

Lucy menambahkan, ke depan akan ada regulasi yang lebih mengikat berupa peraturan daerah terkait perlindungan anak ini. Pasalnya, tahun ini ada Raperda Kota Layak Anak yang menjadi inisiatif dewan. Diungkapkan, pemkot saat ini juga sudah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwal) 34/2015 terkait rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak.

Perwal tersebut, papar dia, menjadi acuan bagi tiap instansi di lingkungan pemkot agar mengedepankan isu anak terhadap kebijakan yang hendak diputuskan.

"Hak anak yang harus dilindungi antara lain hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Selain itu melindungi anak dalam permasalahan sosial, serta mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitasnya," jelasnya.

Secara terpisah, Menteri PPPA, Yohana Yambise, menjelaskan penghargaan KLA diberikan kepada gubernur dan wali kota masing-masing sebagai bukti kepedulian pemerintah untuk tetap menjaga dan melindungi anak dan perempuan.

"Provinsi, kabupaten/kota layak anak saat ini sudah dikembangkan di 260 kabupaten/kota. Kita berikan penghargaan kepada para gubernur, bupati, serta wali kota yang telah mewujudkan provinsi/kabupaten/kota ramah anak," katanya.

Melalui penghargaan itu, Yohana berharap program-program perlindungan terhadap anak di daerah terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian, pemenuhan hak anak-anak di daerah dapat dilakukan secara lebih baik.

■ ed : yusuf assidiq



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005